

Nomor : B-5807/KP.05.01/B2/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Seleksi Terbuka JPT Pratama BKKBN

7 November 2023

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama/Sekretaris Pemerintah Provinsi
(daftar terlampir)
di
tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dengan ini disampaikan bahwa BKKBN akan melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi Jabatan Direktur Pelaporan dan Statistik, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan pelaksanaan Seleksi Terbuka dimaksud kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara/i. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan ketentuan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilihat di *website* <https://www.bkkbn.go.id/>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelayanan di lingkungan Sekretariat Utama dilakukan secara profesional, penuh integritas, bersih dari korupsi dan gratifikasi, tidak ada konflik kepentingan, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Utama,



Tavip Agus Rayanto

Tembusan:
Kepala BKKBN (sebagai laporan).

Lampiran
Nomor : B-5807/KP.05.01/B2/2023
Tanggal : 7 November 2023

A. Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian

1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Sekretariat Negara;
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Agama;
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Keuangan;
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Kementerian Kesehatan;
15. Kementerian Sosial;
16. Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Kementerian Perindustrian
18. Kementerian Perdagangan;
19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Kementerian Perhubungan;
22. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Kementerian Pertanian;
24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
26. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
32. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Kementerian Investasi;
35. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Badan Informasi Geospasial;
3. Badan Intelijen Negara;
4. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
5. Badan Kepegawaian Negara;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Badan Narkotika Nasional;
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS;
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
17. Badan Pusat Statistik;
18. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
19. Badan Standarisasi Nasional;
20. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
21. Badan Siber dan Sandi Negara;
22. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
23. Komisi Pemilihan Umum;
24. Lembaga Administrasi Negara;
25. Lembaga Ketahanan Nasional;
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
27. Ombudsman Republik Indonesia;
28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

D. Sekretariat Pemerintah Provinsi di Indonesia

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Pemerintah Provinsi Aceh;

8. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
10. Pemerintah Provinsi Riau;
11. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
12. Pemerintah Provinsi Bengkulu;
13. Pemerintah Provinsi Jambi;
14. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Pemerintah Provinsi Lampung;
17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
24. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. Pemerintah Provinsi Gorontalo;
28. Pemerintah Provinsi Bali;
29. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Pemerintah Provinsi Maluku;
32. Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
33. Pemerintah Provinsi Papua;
34. Pemerintah Provinsi Papua Barat;
35. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;
36. Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
37. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan;
38. Pemerintah Provinsi Papua Selatan.